



Media: BERNAS

Hari: Kamis

Tanggal: 29 Januari 2015

Halaman: 1

Forpi Berencana Membuat IPK

JOGJA -- Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja berencana membuat dan menyusun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota Jogja. Langkah ini diambil akibat beberapa jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja yang diduga tersangkut kasus korupsi.

Anggota Forpi Kota Jogja Baharuddin Kamba kepada *Bernas Jogja* beberapa waktu lalu menyebutkan, ide untuk membuat IPK bermula dari kondisi sejumlah pejabat di jajaran Pemkot yang terkena perkara korupsi.

Mulai dari Kantor Kesatuan, Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas), Balai Lingkungan Hidup (BLH) dan beberapa instansi lainnya.

"Melihat kondisi terkini, beberapa pejabat diduga terlibat korupsi, kita akan membuat Indeks Persepsi Korupsi untuk melihat tingkat korupsi di Kota Jogja seperti apa," katanya.

Forpi juga akan mengirim rekomendasi untuk memecahkan permasalahan penonaktifan pejabat yang tersandung kasus korupsi. "Seperti kata Pak Walikota Haryadi memang belum ada aturan yang mengatur hal tersebut saat pejabat diduga terkait kasus korupsi. Sebab itu, kita akan pelajari mekanismenya dan mengirimkan surat ke walikota," sebutnya.

IPK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi di suatu daerah atau negara. Di tingkatan internasional, lembaga Transparency International mengeluarkan urutan IPK dari 133 negara. IPK merupakan hasil penelitian kuantitatif yang melibatkan publik, khususnya pelaku usaha seperti penyedia barang dan jasa atau vendor.

"Dari hasil indeks ini nantinya kita berharap dapat diketahui sejauhmana tingkat korupsi di Kota Jogja yang dulu pernah mendapat penghargaan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih," ujar dia.

Secara pribadi, Kamba menyatakan, agar pejabat yang saat ini diduga terlibat kasus korupsi untuk mengundurkan diri atau nonaktif sampai proses hukum yang berjalan selesai.

"Saya secara pribadi lebih sepakat jika ada pejabat Pemkot yang ditetapkan sebagai tersangka lebih baik mundur saja," sebutnya.

Meski demikian, Forpi Kota Jogja, kata Kamba, tetap akan mendukung azas praduga tak bersalah. Walaupun secara etika, pejabat yang diduga tersangkut masalah korupsi akan lebih baik mundur dari jabatannya.

"Kita tetap akan menghormati azas praduga tak bersalah. Sebab itu, sebenarnya keputusan untuk mencopot atau tidak ada di walikota," tandasnya (ros)

Netral | Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005